



PEMERINTAH PROVINSI BALI
INSPEKTORAT
Jalan D. I. Panjaitan No. 14 Niti Mandala, Telp. 243931
DENPASAR

Kode Post 80235

PROFIL INSPEKTORAT PROVINSI BALI



1. Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Inspektorat Provinsi Bali

2. Alamat dan Kontak

Alamat : Jl. DI Panjaitan No.14 Niti Mandala, Denpasar
Telepon : 0361-243931
Email : admin.inspektorat@baliprov.go.id

3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

a. Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada Pasal4, Inspektorat mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kebijakan Daerah

Inspektorat Provinsi Bali memiliki visi menjadi Aparat Pengawas Intern yang profesional untuk meunjang terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan.

Dari visi tersebut dirumuskanlah misi Inspektorat Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik
- b. Mewujudkan Aparatur Pengawas yang profesional

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Bali sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa peraturan hukum yang dikeluarkan Tahun 2017 adalah :

- Keputusan Nomor 48/Itprov/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 800/23/Itprov, tanggal 1 Februari 2017 tentang Penyetaraan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 700/09/Itprov/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembagian Tugas dan Tanggungjawab pada masing-masing Inspektur Pembantu (Irban).
- Keputusan Nomor 51/Itprov/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 53/Itprov/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 1305/Itprov/2017, tanggal 6 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Bali Nomor 53/Itprov/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 52/Itprov/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Keputusan Nomor 94/Itprov/2017, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengelolaan Kearsipan di Irbanwil dan Sub. Bagian pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 95/Itprov/2017, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Arsiparis pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 700/ /Itprov/2018, tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) pada Pemerintahan Provinsi Bali (DRAF).
- Keputusan Nomor 800/22/Sekt/Itprov, tanggal 4 Januari 2017 tentang Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bali Melalui Diklat-Diklat yang Dilaksanakan tahun 2017.
- Keputusan Nomor 221/02-B/HK/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Review Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 816/02-B/HK/2017, tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim koordinasi dan Monitoring pencegahan dan pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintahan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 973/02-B/HK/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian Program Unggulan Bali Mandara Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 213/02-B/HK/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Tunas dan Pembangunan Sistem Integritas Provinsi Bali Tahun 2017.
- Keputusan Nomor 215/02B/HK/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

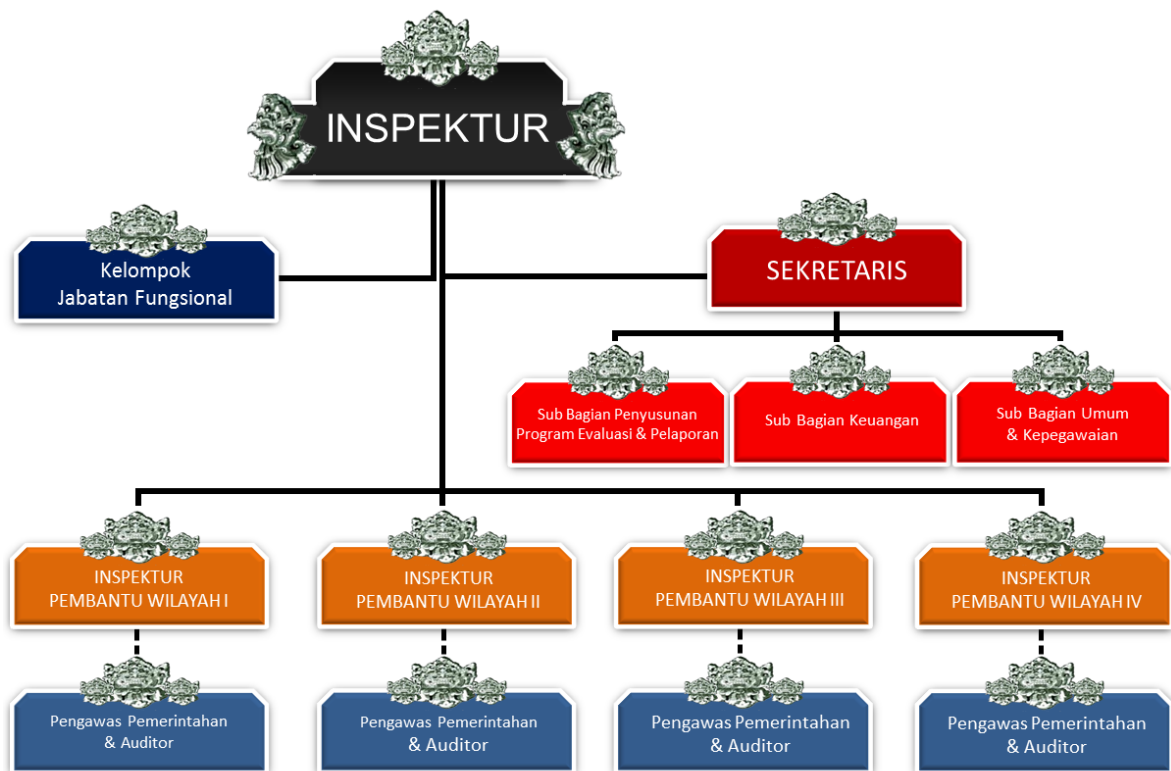
- Keputusan Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 222/02-B/HK/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi/Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 444/02-B/HK/2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 445/02-B/HK/2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Desa.
- Keputusan Nomor 442/02-B/HK/2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi/Penilaian Zone Integritas Instansi Pemerintahan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 815/20-B/HK/2017, tanggal 28 Pebruari tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 2016/02-B/HK/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 2017/02-B/HK/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Nomor 218/02-B/HK/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyelia Informasi atas Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2017.
- Keputusan Nomor 1258/02-B/HK/2017, tanggal 31 Mei 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 15/02-B/HK/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 1029/02-B/HK/2017, tanggal 11 April 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Perangkat Daerah dengan Akuntabilitas Terbaik.
- Keputusan Nomor 906/02-B/HK/2017, tanggal 3 Maret 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Sekretariat Tim Penilai pada Inspektorat Provinsi Bali.
- Keputusan Nomor 800/2224/Itprov, tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pindah Tugas PNS di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bali.

5. Kelembagaan

- a. Inspektorat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2) yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah dalam menentukan kebijakan.
- b. Jabatan Perangkat Daerah pada Inspektorat terdiri dari :

- Inspektur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
 - Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- c. Untuk melaksanakan tupoksi dan sasaran yang ingin dicapai tersebut Inspektorat Provinsi Bali memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
- Inspektur
 - Sekretaris
 - Inspektur Pembantu Wilayah I
 - Inspektur Pembantu Wilayah II
 - Inspektur Pembantu Wilayah III
 - Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Bali



3. Pegawai Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Inspektorat Provinsi Balisebanyak:

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	5 orang
3	Pejabat Eselon IV	3 orang
4	Staf	53 orang
5	Fungsional	40 orang
6	CPNS	- orang
7	Tenaga Honorer	- orang
8	Tenaga Harian	- orang

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
9	Tenaga Kontrak	35 orang
Jumlah		137 orang

Pola pembinaan karir pegawai telah terlaksana melalui prosedur yang berlaku seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai, kesejahteraan, dan sebagainya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Kenaikan gaji berkala	58 orang
2	SKP 2016 dan sasaran 2017/2018	102 orang
3	Model C	102 orang
4	Kartu Pegawai	4 orang
5	KARIS/KARSU PNS	7 orang
6	Satya Lencana Karya Satya 10 tahun	8 orang
7	Satya Lencana Karya Satya 20 tahun	2 orang
8	Satya Lencana Karya Satya 30 tahun	3 orang
9	Kenaikan pangkat	11 orang
10	Taspen	- orang
11	Hukuman disiplin	- orang

4. Keuangan Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan program dan sasaran melalui DPA Tahun 2017 sebagai berikut:

Tahun 2017

NO	KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI		PERBEDAAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA :				
1	Belanja tidak langsung	20.329.963.070	17.939.703.739	88,24	
2	Belanja langsung:	7.575.867.180	6.388.826.968	84,33	
	a. Belanja pegawai	118.570.000	102.140.000	86,14	
	b. Belanja barang dan jasa	5.570.540.180	4.633.462.636	83,18	
	c. Belanja modal	1.886.757.000	1.653.224.332	87,62	
II	PENDAPATAN				

Tahun 2017/2018

NO	KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI		PERBEDAAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA :				
1	Belanja tidak langsung	20.809.074.711	-	-	
2	Belanja langsung:	17.500.000.000	1.262.780.990	7,22	
	a. Belanja pegawai	734.030.000	3.454.200	0,47	
	b. Belanja barang dan jasa	12.731.300.000	1.259.326.790	9,89	
	c. Belanja modal	4.034.670.000	-	-	
II	PENDAPATAN				


5. Barang Daerah

- a. Proses pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Bali secara umum telah berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Kondisi tersebut tidak sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun**

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia **Nomor 70 Tahun 2012** tanggal 31 Juli 2012.

b. Belanja Modal dalam Tahun 2017 berupa:

NO	NAMA BARANG MILIK DAERAH	REALISASI	
		JUMLAH	(RP)
1	2	3	4
1	Plang Nama Posko Saber Pungli Provinsi Bali	1 Buah	687.500
2	Meja Makan Bundar	10 Buah	64.350.000
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	6.000.000
4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	6.000.000
5	Kursi Staf	130 Buah	91.000.000
6	Sofa	1 Set	18.500.000
7	HP Samsung S7	1 Unit	10.450.000
8	Compact Rolling Shelving (Filling Kabinet Sistem Geser)	1 Unit	169.706.900
9	Draper Fast FSDR 1723 (front only) Panasonic Projector PT LB353	1 Pket	24.893.000
10	Pengadaan Microphone/Wireless/ Pengeras suara lainnya	1 Paket	124.500.000
11	LG 75UJ657T 75 inch UHD 4K Smart LED TV	2 Unit	96.000.000
12	Stand TV (beroda)	2 Unit	5.500.000
13	Rehab Penyekat Ruang Rapat Utama Gedung Baru	1 Paket	102.579.691,24
14	Rehab ruang rapat lantai 2 dan 3 gedung lama		158.911.014,67
15	Rehab gedung parkir menjadi gudang	1 Paket	51.491.294,07
16	Pembuatan tempat gedung parkir	1 Paket	169.573.359,11
17	Pembelian Gapuran (gedung baru)	1 Paket	72.256.779,29
18	Plang nama kantor	1 Paket	107.316.861,62
JUMLAH			617.587.400,00

Denpasar, 22 Pebruari 2018
 Inspektur Provinsi Bali

I Wayan Sugiada, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651231 198603 1 175